

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

NOTA DINAS

NOMOR 231/DJPK.1/KP.750/IV/2025

Yth : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Hal : Penyampaian Rekapitulasi Pelaporan LHKAN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Tanggal : 24 April 2025

Menindaklanjuti hasil pemantauan penyampaian LHKAN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh tim Inspektorat V - Inspektorat Jenderal KKP sesuai surat tugas nomor B.193/ITJ.5/KP.440/III/2025, bersama ini kami sampaikan rekapitulasi hasil penyampaian Laporan harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dilingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sebagaimana terlampir, bukti dukung pelaporan baik LHKPN dan SPT Tahunan telah kami unggah dan dapat dilihat pada tautan link <http://bit.ly/42KE4OG>.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Miftahul Huda

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.
2. Inspektur V.

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
TAHUN PELAPORAN 2024

Unit Kerja : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

No	Keterangan	Unit Kerja													JUMLAH
		PUSAT					UPT								
		Sekretariat	Direktorat Penataan Ruang Laut	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Direktorat Jasa Kelautan	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	BPSPL Padang	BPSPL Pontianak	BPSPL Denpasar	BPSPL Makassar	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru	LPSPL Sorong	LPSPL Serang	
1	Jumlah Seluruh Aparatur Negara (Wajib Lapor 2024)	87	63	61	71	57	58	50	50	55	50	40	30	52	724
	a. Wajib LHKPN	5	1	1	1	1	5	6	5	7	6	6	5	7	56
	b. Tidak Wajib LHKPN	82	62	60	70	56	53	44	45	48	44	34	25	45	668
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	5	1	1	1	1	5	6	5	7	6	6	5	7	56
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	87	63	61	71	57	58	50	50	55	50	40	30	52	724
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban LHKAN (LHKPN maupun SPT Tahunan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mengetahui,

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Miftahul Huda